

December 1992

## PERKEMBANGAN POLITIK DI NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN

Zulkifli Hamid  
*Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

---

### Recommended Citation

Hamid, Zulkifli (1992) "PERKEMBANGAN POLITIK DI NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 3 : No. 0 , Article 6.

DOI: 10.7454/global.v3i0.596

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol3/iss0/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# PERKEMBANGAN POLITIK DI NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN

---

*Zulkifli Hamid*

*Zulkifli Hamid adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Politik FISIP-UI. Lulus sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Politik FISIP-UI, 1982.*

## Pendahuluan

PERHATIAN dunia terhadap kawasan Pasifik Selatan semakin berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagai bagian dari dunia internasional yang bergerak sejak lahirnya negara-negara baru di tahun 1960-an, Pasifik Selatan tampaknya akan selalu menjadi kawasan yang berkembang secara dinamis. Hal ini bukan karena Presiden Reagan mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad Pasifik.<sup>1</sup> Demikian pula bukan karena beberapa negara, yang sebelumnya kurang memberikan perhatian terhadap wilayah ini, seperti Jepang, Uni Soviet (US), Republik Rakyat Cina (RRC), dan Libya mulai ambil bagian dalam kehidupan politik dan ekonomi di negara-negara Pasifik Selatan. Akan tetapi, karena dua masalah penting di kawasan tersebut, dekolonisasi di Kaledonia Baru dan denuklirarisasi Pasifik Selatan, akan selalu me-

narik perhatian dunia dalam tahun-tahun mendatang.

Lebih penting daripada itu adalah pergolakan politik yang terjadi pada beberapa negara penting di Pasifik Selatan dalam empat tahun belakangan ini. Masalah-masalah seperti kudeta militer di Fiji tahun 1987, pemberontakan di Bougainville tahun 1989, percobaan kudeta di Vanuatu tahun 1988, dan pembunuhan terhadap dua tokoh Kanak modern di Kaledonia Baru 1989, telah membuktikan bahwa dinamika politik masyarakat Pasifik Selatan telah menuju pada kekerasan fisik. Peristiwa-peristiwa tersebut telah memecah dugaan sementara orang yang menganggap bahwa Pasifik Selatan adalah kawasan yang aman dan damai, yang sering disebut sebagai "Lautan Teduh". Di luar pemberontakan di Bougainville, ketiga masalah lainnya merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan politik di Pasifik Selatan.

Keempat masalah yang disebutkan terakhir ini merupakan fokus utama dari makalah ini. Masalah-masalah ini menunjukkan betapa kerasnya dinamika politik masyarakat kawasan Pasifik Selatan dalam membela atau memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Sebab-sebab, akibat, dan penyelesaian terhadap masalah-masalah me-

---

<sup>1</sup>Presiden Reagan mengatakan hal itu dalam salah satu pernyataan kebijaksanaan awalnya pada tahun 1981. Lihat Pacific Issue, No. 1/1990 (Melbourne: Social Responsibility and Justice Uniting Church in Australia, 1990), H.V.

rupakan beberapa bagian analisis dari masalah ini. Dasar-dasar dari permasalahan yang ada di dalam masing-masing negara tersebut (Fiji, Vanuatu, PNG, dan Kaledonia Baru<sup>2</sup>) juga diungkap secara sepintas dalam analisis. Selain itu, penulis juga berusaha melihat keterlibatan kekuatan-kekuatan luar dalam peristiwa-peristiwa tersebut.

### **Kudeta Militer di Fiji: Menjamin Supremasi Bumiputera**

Kudeta militer di Fiji pada bulan Maret 1987 telah memecah ketenangan di kawasan Pasifik Selatan. Peristiwa pengambilalihan kekuasaan secara tidak lazim ini, yang baru pertama kali terjadi di kawasan ini, dilakukan oleh Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka, sekarang mayor jenderal. Pada tanggal 14 Mei 1987, di bawah komando Rabuka, para prajurit Fiji bersenjata memasuki ruang parlemen dan menangkap Perdana Menteri (PM) Timocci Bavadra dan anggota kabinetnya, serta beberapa anggota parlemen lainnya. Ketika itu parlemen baru pertama kali bersidang setelah kemenangan koalisi Partai Buruh Fiji (FLP), yang berprinsip kepada ideologi sosialis, dan Partai Federasi Nasional (NFP), yang didukung oleh keturunan India, dalam pemilihan umum April 1987. Beberapa dari mereka yang ditahan dilepaskan setelah diperiksa, namun PM Bavadra dan ketiga anggota kabinetnya tetap ditahan.

Keesokan harinya, Rabuka mengumumkan pembubaran parlemen dan berjanji akan membentuk kabinet sementara, yang akan dipimpinnya sendiri. Dalam pidatonya, yang disiarkan melalui radio Fiji, Rabuka menyatakan bahwa tindakannya menggulingkan pemerintahan Bavadra adalah untuk mencegah pertumpahan darah

yang lebih besar antara dua kelompok ras utama, yaitu bumiputera Fiji dan keturunan India. Selain itu, ia juga menjamin akan supremasi bumiputera Fiji dalam masa mendatang.<sup>3</sup>

Sementara itu, PM Bavadra, yang disingkirkan dari kekuasaannya, menyerukan kepada para pendukungnya untuk menegakkan demokrasi, dengan cara mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan yang sah. Kepada negara-negara tetangganya, Australia dan Selandia Baru, Bavadra juga meminta agar dilakukan tindakan militer untuk mengakhiri aksi kudeta militer tersebut. Australia dan Selandia Baru, menanggapi dengan cara mengirimkan beberapa kapal perangnya ke wilayah perairan Fiji, namun tidak mendaratkan pasukan ke daratan Fiji. Kapal-kapal tersebut hanya membuat manuver militer serta memantau perkembangan di Fiji dari jauh. Selanjutnya, kedua negara besar di kawasan tersebut menerapkan sanksi ekonomi terhadap Fiji.

Peristiwa kudeta itu kelihatannya merupakan ekor dari kekerasan fisik antara bumiputera Fiji dengan keturunan India yang terjadi dua minggu sebelum berlangsungnya kudeta. Setiap hari jalan-jalan di ibukota Suva dibanjiri oleh demonstrasi yang dilancarkan oleh gerakan Taukei (gerakan bumiputera) pimpinan Apisai Tora,<sup>4</sup> yang menuntut pembubaran kabinet koalisi FLN-NFP, yang didominasi oleh keturunan India. Demonstrasi secara reli yang diselenggarakan mereka telah mengarah pada pertumpahan darah di antara pendukung PM Bavadra, yang kebanyakan adalah orang-orang keturunan India.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>*The Evening Post*, 16 Mei 1987.

<sup>4</sup> Apisai Tora adalah anggota Partai Aliansi dan mantan Menteri Pembangunan Pedesaan dan Menteri Pekerjaan Umum dalam dua kabinet Aliansi pimpinan Ratu Mara.

<sup>2</sup> Kaledonia Baru adalah salah satu wilayah di Pasifik Selatan yang masih menjadi bagian dari Departemen Wilayah Seberang Laut Pemerintah Prancis.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bahwa apakah mencegah kerusuhan antarkedua ras yang saling bersaing diperlukan pembubaran parlemen dan menggulingkan pemerintahan Bavadra yang telah dipilih secara sah oleh rakyat Fiji. Menurut saya, ada tujuan yang lebih jauh dari sekadar mencegah kerusuhan di antara kedua ras utama. Untuk itu ada baiknya kita melihat permasalahan dasar dari masyarakat Fiji. Penduduk Fiji, yang berjumlah sekitar 700.000 jiwa, merupakan masyarakat multirasial, yang terdiri dari sekitar 50% keturunan India, 43% bumiputera, dan 7% terdiri dari ras lain seperti Eropa, Cina, Polinesia, dan lain-lain (yang tersebut General Elector). Dalam kehidupan masyarakat, disengaja atau tidak, terjadi pemisahan di antara dua ras utama, yaitu antara kaum bumiputera dan keturunan India. Partai politik utama yang muncul semenjak tahun 1960-an tampak mewakili kepentingan masing-masing ras: NFP membawa kepentingan keturunan India dan Partai Aliansi mewakili bumiputera. Organisasi-organisasi sosial lainnya, seperti organisasi guru juga terpisah berdasarkan ras. Bahkan sekolah-sekolah dasar terbagi atas konfigurasi ras utama ini.<sup>6</sup> Konstitusi yang berlaku di Fiji, baik konstitusi tahun 1966 maupun konstitusi tahun 1970, juga mencerminkan konfigurasi ras di Fiji.<sup>7</sup>

Selain minoritas dari segi kuantitas dan adanya persamaan hak di antara kedua ras utama, kaum bumiputera mempunyai ke-

khawatiran terhadap keturunan India. Apalagi, secara ekonomi kaum bumiputera jauh tertinggal dibandingkan dengan keturunan India. Penduduk India menguasai perekonomian Fiji, dari industri jasa lainnya. Bidang profesi lainnya, seperti kedokteran, hukum dan lain-lainnya, juga diduduki oleh keturunan India. Sedangkan kaum bumiputera hanya memiliki satu sumber ekonomi, yaitu tanah di negerinya. Hal itu terpelihara semenjak pemerintah kolonial Inggris berkuasa memberi kemerdekaan kepada masyarakat Fiji. Semenjak kemerdekaan tahun 1970, hak-hak bumiputera terjaga dengan baik, karena partai Aliansi selalu memenangkan pemilu, yang berlangsung lima tahun sekali, sehingga kekuasaan politik senantiasa berada di kaum bumiputera.

Kekhawatiran itu terjadi ketika koalisi FLP-NFP pimpinan Bavadra memenangkan pemilu 1987. Sekalipun Bavadra adalah seorang bumiputera, namun ia menempatkan tujuh keturunan India, enam bumiputera, dan satu general elector (sebutan bagi kelompok non-India dan bumiputera) dalam kabinetnya, yang kemudian disebut "kabinet yang didominasi keturunan India". Selain itu tersebar isu yang mengatakan bahwa kabinet Bavadra akan memperpanjang jangka penyewaan tanah bumiputera sampai 75 tahun.<sup>8</sup> Tak heran bahwa selama kampanye pemilu 1987, kalangan Partai Aliansi menyebut Bavadra sebagai "boneka India".

Sementara itu ada dugaan bahwa intelijen AS (CIA) terlibat dalam penggulingan PM Bavadra. Masalah keterlibatan AS ini dugaan oleh Bavadra dalam rangka kunjungan ke Australia dan AS, beberapa waktu setelah dibebaskan dari tahanan militer, dalam rangka menarik dukungan negara-negara tersebut atas pemerintahannya. Antara lain dikatakan oleh Bavadra bahwa keterlibatan CIA dalam kudeta, karena

<sup>5</sup>Lihat laporan wartawan Selandia Baru dalam *The Evening Post* dan *The Dominion*, 16-25 Maret 1987.

<sup>6</sup>Brij V. Lal, "Postscript, Emergence of the Fiji Labour Party", dalam Brij V. Lal (ed), *Politics in Fiji* (Australia: Allen & Unwin, 1986), hlm. 139-148; lihat juga Robert Norton, *Race and Politics in Fiji* (Queensland: University of Queensland Press, 1977), hlm. 9-15.

<sup>7</sup>Lihat Ropate Qalo, *Divided We Stand, Local Government in Fiji* (Suva: University of the South Pacific, 1984), hlm. 8-9.

<sup>8</sup>*The evening Post*, 18 Mei 1987.

pemerintahnya akan menutup pelabuhan-pelabuhan Fiji bagi angkatan laut AS.<sup>9</sup> Selain itu ia mengungkapkan beberapa indikasi yang menunjukkan keterlibatan tersebut, antara lain dikatakan bahwa Jenderal Vernon Walter, duta besar AS untuk PBB, sekitar bulan April berada di Fiji untuk bertemu dengan Letkol Rabuka, yang diduga untuk membicarakan soal kudeta. Selain itu Willem Paupe, direktur Badan Pengembangan Internasional AS di Fiji, adalah agen CIA, yang menyalurkan dana 200.000 dolar AS kepada Apisai Tora, salah seorang pimpinan gerakan Taukei.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, satu-satunya pernyataan resmi pemerintah AS justru datang dari duta besar AS untuk Australia, Willem Lane, yang menolak semua tuduhan tersebut. Akan tetapi ia sendiri tidak menolak indikasi-indikasi yang dituduhkan oleh Bavadra dan anggota kabinetnya, hanya saja semua itu tidak ada kaitannya dengan usaha kudeta.<sup>11</sup> Memang sulit untuk membuktikan kebenaran mengenai keterlibatan AS dalam usaha kudeta tersebut, karena terdapat perbedaan interpretasi atas indikasi-indikasi yang diungkapkan antara Bavadra dan William Lane.

Terlepas dari masalah keterlibatan AS dalam politik Fiji saya menganggap bahwa kudeta militer yang dilaksanakan oleh Letkol Rabuka lebih banyak didorong oleh motivasi untuk mengembalikan kekuasaan politik ke tangan bumiputera. Tindakan yang dilakukan oleh PM Bavadra dianggapnya telah membahayakan kepentingan bumiputera, bahkan, barangkali, telah mencabik hak-hak bumiputera yang sudah terpelihara sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak *Deed of Cession* ditangani oleh para

kepala suku Fiji dengan pemerintah Inggris pada tahun 1874.<sup>12</sup> Selain itu, banyak indikasi lain yang membuktikan bahwa Rabuka sangat berusaha memajukan kepentingan bumiputera. Antara lain misalnya, Rabuka membiarkan Richard Naidu, keturunan India yang menjadi jurubicara koalisi FLN-NFP, "dikeroyok" oleh kelompok *Taukei*, sekalipun ia telah melaporkan tindakan kelompok *Taukei* kepada pihak militer. Demikian pula, Rabuka justru mengadakan kudeta pada bulan September, sebagai pernyataan ketidaksetujuannya terhadap pemerintahan sementara Ratu Sir Kamisese Mara dan Gubernur Jenderal Ratu Sir Penaia Ganilau ketika mereka akan membicarakan soal perubahan konstitusi dengan pimpinan koalisi Bavadra.<sup>13</sup> Dalam hal ini Rabuka mengatakan bahwa pembicaraan soal konstitusi dengan pihak Bavadra adalah menjauhkan diri dari tujuan kudeta. Dalam pada itu, antara bulan September 1987 sampai Januari 1990, sebagai "orang kuat" dalam pemerintahan Fiji, Rabuka banyak mengeluarkan dekrit yang menguntungkan kaum bumiputera.<sup>14</sup> Dengan demikian, memajukan kepentingan bumiputera adalah faktor utama yang mendorong kudeta tersebut. Rabuka akhirnya bersedia mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah sipil, pimpinan Presiden Ratu Ganilau dan PM Ratu Mara, dan mengundurkan diri dari jabatan pemerintah, setelah ada jaminan bahwa perubahan konstitusi harus menjamin kepentingan bumiputera. Konstitusi baru Fiji sudah diber-

<sup>9</sup>*The Sydney Morning Herald*, 16 November 1987.

<sup>10</sup>*The Evening Post*, 10 Juli 1987; *The Age*, 18 Maret 1988.

<sup>11</sup>Pernyataan Duta Besar AS di Australia, William Lane, "The Real behind the scenes story of Fiji's Coup" dalam *The Sydney Morning Herald*, 16 November 1987.

<sup>12</sup>Mengenai pelaksanaan *Deed of Cession* oleh pemerintah Inggris, lihat Ahmed Ali, "Fiji, Political Change, 1874-1960" dalam Lal (ed), *Politics ...*, hlm. 1-26.

<sup>13</sup>Lihat *The Age*, 25 September 1987.

<sup>14</sup>Meskipun ia bertindak demi keamanan, namun sebenarnya untuk mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang India, pendukung mantan PM Bavadra; antara lain Rabuka mengeluarkan Dekrit No. 32 tentang *Internal Security Decree (ISD)*. Mengenai isi lengkap ISD dapat dilihat pada *Pasific Issue No. 3/1988*, hlm. 30-36.

lakukan pertengahan tahun 1990, meskipun terdapat berbagai pendapat ketika perumusannya, namun keinginan Rabuka telah tercapai. Konstitusi, antara lain, menjamin perlindungan terhadap reputasi, kewibawaan, dan kehormatan lembaga-lembaga dan nilai-nilai bumiputera, terutama Dewan Besar, kepala suku, dan sistem bumiputera serta gelar-gelar tradisional; mengizinkan pemerintah untuk mencadangkan beasiswa, peluang latihan, surat izin usaha, dan bantuan keuangan dalam usaha perdagangan bagi bumiputera. Selain itu, dinyatakan pula bahwa Dewan Besar kepala suku diberikan kekuasaan untuk mengangkat presiden, yang memiliki kekuasaan eksekutif dan panglima angkatan bersenjata, presiden memilih seorang anggota parlemen bumiputera sebagai perdana menteri "yang kelihatan mampu memimpin mayoritas"; wakil perdana menteri juga harus seorang bumiputera, yang juga bertindak sebagai komisi pegawai negeri, mayoritas komisaris polisi, ketua komisi polisi-polisi. Dalam hal kursi parlemen, konstitusi menegaskan bahwa parlemen terdiri atas 69 anggota parlemen yang dipilih berdasarkan perwakilan komunal, yaitu 37 untuk bumiputera (mewakili daerah pemilihan propinsi, dan tujuh perkotaan), 27 untuk India, 4 *general elector*, dan satu untuk Kepulauan Rotuma.<sup>15</sup>

Akhirnya adalah seberapa jauh konstitusi baru Fiji dapat diterima oleh masyarakatnya. Keefektifan konstitusi, yang dibentuk oleh pemerintah sementara Republik Fiji pimpinan Presiden Ratu Ganilau dan PM Ratu Mara, serta di bawah kekuasaan regim militer Rabuka, masih akan ditentukan dalam

pemilu yang akan dilangsungkan sekitar bulan Agustus 1992. Akan tetapi, yang jelas, Balwant Singh, presiden NFP, menyatakan akan ikut pemilu tahun mendatang; dan mantan pemimpin oposisi dari NFP, Jairam Reddy, mengingatkan bahwa memboikot pemilu akan merugikan partai, karena banyak keturunan India yang nonpartai akan mencalonkan diri.<sup>16</sup> Sementara, FLP, kemungkinan, akan memboikot pemilu.

### Pemberontakan di Bougainville: Separatisme yang Tak terselesaikan

PM Rabie Namaliu mengumumkan penundaan kunjungan resmi 10 hari ke Australia, yang direncanakan dilaksanakan awal April 1989, untuk menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan 5 tahun.<sup>17</sup> Penundaan ini bukanlah disebabkan oleh memburuknya hubungan kedua negara, melainkan karena adanya serangkaian krisis politik dalam negeri yang masih harus dihadapi oleh Namaliu, yaitu masalah separatisme Bougainville. Krisis yang berlangsung sejak akhir November 1988 ini telah meningkat menjadi kekerasan pada awal tahun 1989.

Pada mulanya adalah Francis Ona, seorang pemuda terpelajar pemilik tanah di daerah penambangan panglima dan mantan Surveyor pada Bougainville Coper Limited (BCL), menuntut uang sejumlah 10 milyar kina (kira-kira 16 milyar dolar Australia) sebagai kompensasi dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut.<sup>18</sup> Bila pihak perusahaan te-

<sup>15</sup>Lihat "Boom or bust? Question still haunts Fiji" dalam *The Island Business*, Oktober 1989; lihat *The Australian Financial Review*, 4 Oktober 1988. Mengenai sikap pro dan kontra terhadap konstitusi baru; lihat *The Age*, 6 Januari 1990, dan *Fiji Situation Report*, 8 Januari 1990.

<sup>16</sup>*Kompas*, 30 Juli 1991; dan *The Jakarta Post*, 30 Juli 1991.

<sup>17</sup>Rowan Callick, "Namaliu postpones visit because of troubles at home" dalam *The Australian Financial Review*, 31 Maret 1989.

<sup>18</sup>Tim Whale, "Land the fuse to PNG powder keg", dalam *The Australian*, 13 April 1989; lihat juga Mary-Louise O'Callaghan, "Army expects bloodshed in Bougainville emergency", dalam *The Age*, 26 Juni 1989.

tap berkeras mengenai masalah keuangan ini, maka pemisahan diri PNG dalam bahasa mereka "back Lusin PNG" adalah jalan satu-satunya. Tuntutan Ona tidak mendapat perhatian, baik oleh pihak BCL maupun pemerintah PNG, sehingga kelompoknya mengadakan kekerasan terhadap pihak pertambangan, yang menimbulkan kekhawatiran tertentu para pekerja tambang. Terutama yang berasal dari dataran tinggi, sehingga menyebabkan munculnya masalah perusahaan etnis antara penduduk Bougainville dengan penduduk dataran "tinggi". Pihak kepolisian, yang dikerahkan oleh pemerintah PNG, mengalami kesulitan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.

Sementara pihak militer, yang dikirim oleh pemerintah untuk menertibkan situasi dan menangkap Ona, mengalami kesulitan dalam menghadapi kaum perusuh. Selain mendapat simpati dari rakyat Bougainville, kaum militan Bougainville juga mempunyai kemampuan untuk menyerang posisi-posisi militer, dan sabotase terhadap fasilitas pemerintah. Tidak ada laporan resmi mengenai kerugian yang dialami pemerintah, namun surat kabar melaporkan kerugian meliputi jutaan dolar Australia. Selain korban jiwa, fasilitas serta perlengkapan milik pemerintah di wilayah Bougainville, seperti kantor penerbangan Air Niugini di bandara internasional Kieta, dan pesawat terbang milik pemerintah setempat "Bougair", telah dirusak oleh kaum perusuh. Di wilayah Buin, bulan April 1989, dalam suratnya yang ditulis tangan kepada para pilitisi, Francis Ona memproklamasikan Bougainville sebagai "Republik" yang terpisah dengan PNG, serta menamakan kelompoknya sebagai "Bougainville Revolutionary Army (BRA).<sup>19</sup> Ketidakmampuan militer untuk mengatasi kerusuhan itu mengakibatkan berlarut-larutnya, penyelesaian masalah

Bougainville. Sampai dengan awal tahun 1991, Ona dengan kelompoknya tetap pada tuntutannya serta mengadakan perang gerilya melawan pemerintah PNG. Sementara, pemerintah, untuk sementara waktu, menutup semua kegiatan penambangan di wilayah Bougainville.

Masalah Bougainville adalah salah satu dari sekian banyak masalah integrasi nasional yang dihadapi oleh pemerintah PNG. Topografi PNG sangat tidak menunjang pada pembentukan suatu negara kesatuan yang berdaulat. Wilayah PNG yang luas merupakan daerah pegunungan yang sulit untuk dijangkau, dan belum berkembangnya jaringan transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil kiranya menyulitkan komunikasi di antara penduduk PNG. Di dalam wilayah yang luas ini terdapat sekitar 700 suku yang tersebar di wilayah PNG, di samping beragamnya bahasa suku-suku tersebut, yang terbesar di antaranya bahasa Pidgin dan Motu.

Tersebarinya penduduk menurut suku dengan sulitnya mereka berhubungan satu dengan lainnya menyebabkan pemerintah sulit mengorganisir rakyatnya, yang umumnya belum tersentuh oleh lembaga-lembaga modern. Sebaliknya, masing-masing suku lebih taat pada para pemimpin lokal yang dianggap dapat memenuhi aspirasinya, sehingga lebih mengetatkan sikap primordial di antara masing-masing suku tersebut. Selama masa kolonial, pemerintah Australia tidak pernah membina integrasi dikalangan suku-suku yang tersebar di wilayah ini. Satu-satunya lembaga yang bersifat nasional yang dibentuk pemerintah Australia pada masa kolonial adalah angkatan bersenjata PNG, yang didirikan sejak berakhirnya Perang Dunia II sebagai bagian dari AB Australia. Sementara lembaga-lembaga nasional lainnya, seperti parlemen Nasional, baru dibentuk ketika dekolonisasi mulai diberlakukan tahun 1960. Meskipun pada awalnya, Parlemen

<sup>19</sup>The Age, 13 April 1989.

Nasional kurang efektif dalam melaksanakan integrasi nasional, namun boleh dikatakan bahwa dari Parlemen inilah lahir pemimpin-pemimpin PNG yang berwawasan nasional. Di luar lembaga itu, tidak ada pemimpin PNG yang berwawasan nasional.

Masalah sulitnya mengorganisir rakyat seperti inilah yang menyebabkan para pemimpin nasional PNG menerapkan sistem desentralisasi melalui pemerintahan propinsi, dengan maksud agar rakyat dapat ikut serta dalam pemerintahan menurut cara-cara yang mereka terapkan secara tradisional.<sup>20</sup> Dengan demikian tak mengherankan bila semenjak kemerdekaan, PNG dihadapi oleh masalah pemisahan diri. Antara lain, misalnya, gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh suku Tolai di kepulauan Gazelle, dan Papua Besena.<sup>21</sup>

Masalah separatisme Bougainville, yang sudah mewarnai kehidupan politik PNG sejak September 1975 dan muncul lagi pada tahun 1984, mempunyai akar permasalahan yang sama. Separatisme yang dilakukan oleh kaum pemuda militan pimpinan Ona pada tahun 1988, meskipun tidak mempunyai hubungan dengan para pemimpin gerakan separatis yang lalu.<sup>22</sup> Mempermasalahan kepentingan ekonomi. Beberapa pengamat me-

lihat bahwa masalah pemisahan diri Bougainville merupakan implikasi dari besarnya kepentingan ekonomi pemerintah PNG, yang mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Sebagian propinsi yang kaya akan bijih besi, penduduk Bougainville, sebagai pemilik tanah, hanya menikmati sewa tanah. Sementara keuntungan terbesar dari eksploitasi ini jatuh ke tangan perusahaan BCL, yang merupakan cabang perusahaan Cozinc Rio-Tinto yang berpusat di Australia, dan menyumbang 45% dari ekspor PNG serta memasukkan sekitar 20% devisa pemerintah PNG.<sup>23</sup> Manajemen serta buruh tambang juga dikuasai oleh orang-orang Australia dan buruh dari Propinsi East New Britain. Dalam pada itu, kerusakan yang diakibatkan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan diserahkan kepada pemilik tanah. Oleh karena itulah, Ona mengemukakan isu kompensasi atas kerusakan lingkungan demi masa depan generasi muda Bougainville, yang dilanjutkan dengan peningkatan jumlah saham diperusahaan.<sup>24</sup> Separatisme sangat mungkin dilakukan karena Bougainville yang merupakan bagian dari Propinsi Solomon Utara, letaknya relatif jauh dari ibukota Port Moresby (800 Kilometer), sehingga pengawasan pemerintah pusat agak kurang di wilayah ini.

Di balik kepentingan ekonomis, tampaknya pemerintah Australia juga melihat masalah separatisme di Bougainville dapat membahayakan kepentingan strategisnya di

<sup>20</sup>Stephen P. Pokawin, "Papua New Guinea, Aftermath of Colonialism", dalam Ron Crocombe et. al. (eds), *Politics in Melanesia* (Suva: University of the South Pacific, 1982), hlm. 54-56; William Tordoff, "Issue in Decentralisation in PNG" dalam *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, hlm. 44-67.

<sup>21</sup>Untuk uraian teoretis tentang separatisme di PNG, lihat T. Scarlett Epstein, "Economics and Politics in PNG: Separatism and the Mataungan Movement", dalam Marion W. Ward (ed), *Politics of Melanesia* (Canberra/Port Moresby: Australian National University and University of Papua and New Guinea, 1973), hlm. 64-81.

<sup>22</sup>Joseph Kabui, pendukung aktif pemberontakan pada tahun 1974 yang kini menjadi PM Propinsi Solomon Utara, membantu pemerintah untuk mengadakan hubungan dengan Ona; bahkan ia mengatakan bahwa "apa yang terjadi sekarang tidak baik bagi persatuan nasional"; lihat *The Age*, 21 Maret 1989.

<sup>23</sup>A.M. Tati Sriwinarti, *Kebijakan Australia terhadap Papua Niugini menjelang dan setelah kemerdekaan: Perubahan atau kesinambungan kolonialisme* (Jakarta: skripsi pada FISIP-UI 1990), hlm. 143.

<sup>24</sup>Pemilikan saham pada BCL adalah : 5% bagi provinsi, 20% pemerintah nasional, 75% perusahaan. Sementara itu, rakyat Bougainville tidak menikmati lagi tanah yang dipergunakan untuk penambangan karena kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan; lihat Rowan Callick, "PNG sends troops to quell Bougainville ethnic violence", dalam *The Australian Financial Review*, 22 Maret 1989.

PNG. Pemerintah mengawatirkan bahwa kerusuhan di Bougainville dapat membawa kemungkinan masuknya kekuatan-kekuatan asing yang tidak bersahabat, yang bisa mengganggu keamanan terjadi terdapat isu bahwa kaum militan Bougainville mendapat dukungan senjata berat dari suatu negara "asing", yang masuk ke wilayah Bougainville melalui kapal selam. Negara asing yang dimaksud adalah US. Isu ini tampaknya dikembangkan oleh lawan-lawan politik Namaliau, yang tidak setuju dengan rencana untuk membuka kedutaan US di Port Moresby.<sup>25</sup> Selain itu berkembang pula isu bahwa kaum militan pimpinan Ona mendapat latihan militer di Libya, di samping dukungan dana bagi keperluan logistik mereka. Kesimpulan mengenai hal ini juga sulit dibuktikan. Akan tetapi bila dilihat dari taktik perang gerilya yang diterapkan, tampak bahwa militan Bougainville atau BRA memang telah terlatih secara militer.

Menyadari pentingnya PNG dalam kepentingan strateginya, Australia sangat berkesempatan membantu pemerintah PNG dalam rangka mengatasi keadaan di Bougainville. Ketika di Bougainville masih terjadi teror-teror kecil, sekitar tahun 1988, Australia meningkatkan bantuan keuangannya kepada AB PNG dalam bentuk obat-obatan, dan sebagai biaya latihan bagi militer dan paramiliter (komando) yang bertugaskan di Bougainville.<sup>26</sup> Selanjutnya, ketika kerusuhan memburuk, Gareth Evans Menteri Luar Negeri Australia, meskipun menolak untuk terlibat secara dalam di PNG, menyatakan bahwa Australia sangat sensitip bila permohonan untuk terlibat diajukan oleh pemerintah "negara-negara sahabat".<sup>27</sup> Oleh

karena itu pulalah Australia memenuhi permintaan pemerintah PNG untuk mengirim empat buah helikopter untuk meng-evakuasi tentara PNG yang luka dan warga negara Australia. Meskipun secara resmi pengiriman helikopter tersebut untuk evakuasi, namun helikopter yang dikirim adalah jenis heli tempur yang mampu mengangkut pasukan dan pengiriman logistik. Helikopter, yang pernah dipergunakan dalam Perang Vietnam itu, juga mampu membawa roket serta senjata berat untuk menyerang ke darat.<sup>28</sup> Masalah Bougainville belumlah berakhir, namun blokade penyediaan pelayanan dan transportasi yang diberlakukan pemerintah PNG telah menampakkan keefektifannya. Sejak Mei 1990, pemerintah PNG telah melakukan blokade terhadap Bougainville, setelah menarik mundur seluruh militer PNG dan evakuasi terhadap para karyawan serta buruh tambang dari Bougainville. Dalam hal ini, pemerintah menghentikan semua pelayanan serta fasilitas kepada Bougainville, yang mengakibatkan berjangkitnya berbagai penyakit serta kelaparan yang menyebabkan kematian dari penduduk Bougainville. Oleh karena itulah, Ona menawarkan pembicaraan damai mengenai masalah Bougainville dengan pihak pemerintah PNG, meskipun demikian ia tetap tegas untuk tidak mengizinkan militer PNG masuk ke dalam wilayah Bougainville.<sup>29</sup> Penyelesaian yang tuntas mengenai masalah Bougainville akan tergantung pada pemerintah PNG apakah akan menyembuhkan "gejala"-nya ataukah menyembuhkan "penyakit"-nya. Yang jelas pemerintah PNG tidak akan melepaskan propinsi yang kaya akan mineral ini.

<sup>25</sup>Lihat *The Age*, 30 Agustus 1988; dan *The Sun*, 17 Februari 1989.

<sup>26</sup>*The Australian*, 7 Juli 1989.

<sup>27</sup>Mark Metherel, "PNG intervention possible but unlikely; Evans", dalam *The Age*, 8 Desember 1989.

<sup>28</sup>Sriwinarti *loc.cit.*, hlm. 144.

<sup>29</sup>*The Jakarta Post*, 4 Januari 1991 dan 29 Januari 1991.

## Percobaan Kudeta di Vanuatu : Persaingan kepemimpinan

Di tengah-tengah kemelut yang terjadi di Fiji dan PNG, Presiden Vanuatu, Arti George Sokomanu, pada tanggal 16 Desember 1988 mengumumkan pembaruan parlemen, tanpa nasihat dewan menteri pimpinan PM Walter Lini, dan mengangkat Barak Sope, kemenakannya, untuk membentuk pemerintahan sementara. Dua hari kemudian, Barak Sope membentuk pemerintahan sementara dengan dirinya sebagai PM dan pemimpin oposisi Maxime Corlot, sebagai wakil PM. Dalam pernyataannya, Sokomanu mengatakan bahwa tindakannya itu adalah untuk mengakhiri persaingan kekuasaan antara Barak Sope dan PM Walter Lini, dan selanjutnya ia menjanjikan bahwa pemerintah sementara akan mengadakan pemilu dua bulan kemudian.<sup>30</sup>

Menyadari bahwa tindakan Presiden Sokomanu adalah sebuah usaha kudeta konstitusional, PM Walter Lini, yang masih memegang kekuasaan eksekutif, memecat Presiden Sokomanu. Kemudian bersama Dewan Menteri yang dipimpinnya, Walter Lini meminta pengadilan untuk menyelidiki semua yang terlibat dalam usaha kudeta tersebut, dengan alasan bahwa tindakan Sokomanu tidak berdasarkan konstitusi.

Masalah yang terjadi di Vanuatu memang cukup mengagetkan bagi sementara orang. Semenjak kemerdekaannya banyak pengamat menilai bahwa Vanuatu di bawah PM Lini adalah sebuah negara yang sangat radikal dalam kebijaksanaan luar negerinya. Antara lain dukungan Vanuatu terhadap nasib bangsa-bangsa yang masih terjajah di Pasifik Selatan, dan sikapnya terhadap pelaksanaan daerah bebas nuklir Pasifik Selatan. Demikian pula, kokohnya sikap Vanuatu dalam rangka hubungan diplomatiknya dengan Libya, meskipun ham-

pir seluruh negara Pasifik Selatan lainnya sangat mengecam tindakan tersebut.

Tampaknya masalah-masalah politik yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini adalah klimaks dari persaingan politik antara PM Lini dan Barak Sope, yang berlangsung sejak 1987. Sebagian besar rakyat Vanuatu sangat menyangkan terjadinya perpecahan di antara kedua tokoh kemerdekaan Vanuatu. Keduanya adalah teman seperjuangan yang bahu membahu, dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Vanuatu. Mereka juga telah membentuk *Vanua-aku Pati* (VP yang berarti "Tanah kita"), yang pertama kali didirikan pada tahun 1971 bernama New Hebrides National Party (NHNP), yang didirikan dengan semangat dan idealisme anti penjajahan. Sehingga di dalam partai, mereka berbagi kekuasaan dengan Lini sebagai pemimpin dan Sope sebagai sekretaris jenderal. Mereka berdua pulalah yang menulis konstitusi yang mendasari kemerdekaan Vanuatu pada tahun 1980. Di masa-masa awal kemerdekaan, mereka juga berusaha mengintegrasikan 70 pulau, yang terpisah dalam dua sistem politik, sosial, dan budaya sebagai akibat sistem penjajahan yang berciri "Pandemonium" atau Condominium.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, keduanya dipandang sebagai pemimpin yang tak dapat dipisahkan. Perbedaannya adalah Lini, sebagai seorang pastor gereja Anglikan, lebih banyak mencurahkan perhatian pada segi-segi pemerintahan. Sebaliknya, Sope, yang lebih muda, selain mampu bertindak sebagai organisator partai yang baik, juga bergerak dalam kegiatan bisnis, sehingga ia juga di-

<sup>31</sup>Untuk uraian yang lengkap tentang ciri-ciri sistem "Pandemonium"; lihat Father Walter Lini, *Beyond Pandemonium: from New Hebrides, to Vanuatu* (Wellington: Asia Pacific Books, 1980); lihat juga Grace Molisa, Nikenike Vurobaravu, Howajid Van Trease, "Vanuatu: Overcoming Pandemonium" dalam Crocombe, *op.cit.*, hlm. 84-114.

<sup>30</sup>*The Age*, 8 Maret 1989.

kenal sebagai salah seorang pengusaha besar di Vanuatu.

Persaingan antarkeduanya diawali oleh kejadian di sekitar bulan februari 1987, di mana ketika itu PM Lini terkena serangan jantung, yang mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit. Untuk melaksanakan pemerintahan, Lini tidak menunjuk Sope, melainkan mengangkat salah seorang menterinya yang masih muda, Sethy John Regenvanu (sekarang Menteri Pendidikan), sebagai Pejabat PM. Meskipun sudah membaik, Lini masih harus menjalankan pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai Sekjen Partai, Sope bersama-sama mitra bisnisnya (para pengusaha keturunan Vietnam) memanfaatkan situasi itu untuk mengejar proyek-proyek yang dapat memenuhi kepentingan politik dan ekonominya. Di dalamnya termasuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah dan membina hubungan baik dengan Libya. Sope adalah sumber utama dari pembukaan hubungan diplomatik dengan Libya. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan, baik di dalam partai maupun dikalangan rakyat.

Oleh karena itu, setelah kondisinya membaik, Lini mengambil dua keputusan tegas terhadap Sope. Pertama, mengusir dua orang utusan Libya serta meminta rencana-rencana yang dibuat oleh biro rakyat Libya; dan kedua, membubarkan badan pelaksana penerbangan (Air Vanuatu), sebab proyek emasnya Sope.<sup>32</sup> Setelah pemilu November 1987, Sope menantang Lini untuk menjadi pemimpin partai, namun gagal. Meskipun demikian, dengan suatu kompromi, Lini tetap menempatkannya sebagai sekjen partai, dan memberikan posisi sebagai menteri Pekerjaan Umum (PU).

Akan tetapi, persaingan di antara keduanya semakin keras. Dalam kedudukannya

sebagai Sekjen Partai dan menteri PU, Sope menggunakan masalah tanah sebagai isu untuk menggulingkan PM Lini. Pada tanggal 16 Mei 1988, Sope, bersama anggota Vila Urban Land Corporation (VULVAN), memimpin sekitar 2000 orang di ibukota, port Vil, membuat kerusuhan serta menyerang kediaman PM Lini. Satu minggu sebelumnya, Lini menuduh VULCAN, kelompok yang diidentifikasi dengan Sope, telah mengkorupsi uang para pemilik tanah adat.<sup>33</sup> Selain itu, VULCAN diduga telah membuat tanah perkotaan menjadi "tanah negara" dengan cara mengubah status kepemilikan adat agar dilaksanakan atas nama "rakyat".<sup>34</sup> Kerusuhan ini telah menimbulkan masalah keamanan dan krisis politik di Vanuatu, sekalipun hanya seorang meninggal dan kerugian materil sekitar 1,2 milyar dolar Australia.

Salah satu segi yang penting di sini adalah bahwa PM Lini melibatkan militer Australia, Selandia Baru, dan PNG untuk mengatasi kerusuhan ini.<sup>35</sup> Lini tidak menggunakan satuan paramiliter Vanuatu untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Dalam seruannya kepada rakyat Vanuatu, Lini melihat adanya keterlibatan Biro Rakyat Libya dan pelarian Irian Jaya di dalam kerusuhan tersebut. Oleh karena itu, Lini meminta bantuan Australia, dan Selandia baru, yang dengan segera mengirim pasukan gerak cepat ke Vanuatu pada tanggal 17 Mei 1988 serta menentramkan keadaan. Dengan dukungan militer dari negara-negara sahabat, Lini dapat leluasa untuk melakukan serangkaian tindakan politis yang dapat mencegah kemungkinan timbulnya kekerasan politik. Antara lain Lini memecat

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Alan Ward, "Lini's deal is a blow to corruption", dalam *Sydney Morning Herald*, 26 Mei 1988.

<sup>35</sup>Pernyataan Evan di depan Senat pada tanggal 17 Mei 1988; lihat juga *The Age*, 26 Mei 1988.

<sup>32</sup>Marie Louise Callaghan, "A parting of ways in Vanuatu", dalam *The Sydney Morning Herald*, 27 Mei 1988.

Sope dari jabatan menteri, menutup sementara biro rakyat Libya,<sup>36</sup> dan memerintahkan pengusiran 18 pelarian Irian Jaya yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam peristiwa ini.<sup>37</sup>

Untuk sementara waktu, keberadaan pasukan Australia, selandia baru dan PNG, memang menguntungkan posisi Lini. Akan tetapi, setelah penarikan mundur seluruh pasukan asing tersebut, Lini masih menghadapi serangkaian krisis konstitusional yang berkenaan dengan pemecatan Barak Sope. Meskipun seluruh kekuatan Sope sudah dilumpuhkan semenjak peristiwa itu, namun ia masih memiliki sumber-sumber kekuatan konstitusional untuk menggulingkan Lini. Tujuannya, Sope membuat perjanjian dengan bekas lawan politiknya, Maxime Carlot, pemimpin oposisi (*Union of Moderates Party*, dari kelompok masyarakat berbahasa Prancis), untuk memboikot Lini yang berusaha mengadakan Sidang Istimewa Parlemen. Persekongkolan antara Sope dan Carlot terbukti efektif. PM Lini telah dua kali gagal mencapai quorum dua pertiga suara parlemen yang dibutuhkan untuk mengadakan Sidang Istimewa, sehingga seolah-olah tampak adanya krisis kepercayaan terhadap Kabinet Lini. Dan, atas dasar itulah, Presiden Sokomanu memecat Lini dan membubarkan kabinet.<sup>38</sup>

Seluruh pergolakan politik di Vanuatu telah selesai dewasa ini. Pengadilan Vanuatu telah menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dan konstitusi yang terjadi sebagai akibat persaingan politik para pemimpin bangsa Vanuatu. Keputusan pengadilan telah menetapkan bahwa semua yang terlibat dalam

usaha kudeta konstitusional ini harus dipenjarakan sesuai dengan kesalahannya.

### **Pembunuhan Pemimpin Kanak di Kaledonia Baru: Pergolakan Politik dalam Front Kemerdekaan**

Sebenarnya agak janggal untuk memasukkan masalah Kaledonia Baru di dalam pembicaraan mengenai negara-negara Pasifik Selatan. Hal ini terutama, karena wilayah ini bukanlah suatu negara merdeka di Pasifik Selatan. Ia masih merupakan bagian dari salah satu departemen di dalam Pemerintahan Prancis. Akan tetapi, kita tak dapat menyangkal bahwa sebagian besar pembicaraan mengenai masalah di Pasifik Selatan akan selalu menyentuh persoalan di Kaledonia Baru. Karena itulah, masalah Kaledonia baru dimasukkan di dalam analisis masalah perkembangan politik di Pasifik Selatan. Peristiwa yang paling mengejutkan di Kaledonia Baru adalah pembunuhan terhadap pemimpin kemerdekaan rakyat Kanak LNKS (*Front de Liberation Nationale Kanake et Sosioaliste*) Jean-Marie Tjibaou dan Wakilnya Yeiwene pada tanggal 4 Mei 1989 di Wadrilla, sebuah desa di Pulau Ouvea, yang dikenal dengan peristiwa "Ouvea" Peristiwa Ouvea pada 5 Mei 1988, yang menandai perjuangan kemerdekaan rakyat Kanak melalui kekerasan, terjadi ketika pasukan Prancis menyerang sebuah goa, tempat pejuang Kanak menyandra warganegara Prancis.

Penembaknya, Djubeli Wea, terbunuh pada saat itu juga. Media Australia, yang melihat peristiwa ini merupakan puncak dari pertentangan di antara Tjibaou dari *Union Caledonienne* (UC) dengan rekanya yang radikal Yann Celene Urugei dari FULK (*Front Uni de Liberation Kanak*), yang dikeluarkan pada tahun 1986. Yang pasti ialah bahwa Wea adalah tokoh politik dari Desa Gossnh, di Pulau Ouvea, yang merupakan tempat tinggal dari sebagian besar

<sup>36</sup>*The Age*, 16 Juni 1988.

<sup>37</sup>Di antaranya adalah 4 orang pemusik "Black Brothers" di mana salah seorang dari mereka mempunyai hubungan keluarga dengan Barak Sope, karena perkawinan; *The Australian*, 16 Juni 1988.

<sup>38</sup>*The Age*, 5 Mei 1989.

militan Kanak yang terbunuh pada peristiwa itu. Ia dan ayahnya termasuk dari para aktifis yang ditahan beberapa waktu setelah peristiwa Ouvea. Dalam minggu belakangan ini, Wea membentuk "Komite anti neokolonialis" yang menentang rencana perdamaian yang dilakukan Tjibaou dan pimpinan kelompok Eropa serta Pemerintahan Prancis baru-baru ini.

Sungguh disayangkan bahwa peristiwa kekerasan berdarah ini justru terjadi di sekitar Front Perjuangan Rakyat Kanak yang menuntut kemerdekaan dari Prancis, atau FLNKS. FLNKS merupakan wadah dari partai-partai rakyat Kanak yang terbentuk atas dasar "koalisi longgar". Wadah organisasi ini terbentuk, karena kekecewaan mereka terhadap kecurangan pihak Prancis yang menjanjikan kemerdekaan bagi Kaledonia Baru, serta penentangan terhadap kemerdekaan yang dilakukan oleh warganegara Prancis di Kaledonia Baru. Keinginan untuk bersatu dan berjuang bersama-sama muncul ketika Prancis merencanakan untuk mengadakan pemilu bulan November 1984. Bulan September 1985, kelompok ini mengadakan kongres penyatuan perjuangan dan merencanakan pemboikotan nasional terhadap pemilu.

FLNKS merupakan "payung" organisasi dari partai-partai pro kemerdekaan, yang mempunyai program yang berbeda-beda.<sup>39</sup> Di dalamnya terdapat partai-partai UC, PALIKA, FULK, *Union Progresiste Melanisien* (UPM), *Partai Sosialiste de Kanaky* (PSK), dan belakangan ikut bergabung *Liberation Kanake Socialiste* (LKS).

Organisasi terbesar dan tertua di dalam FLNKS adalah UC yang didirikan pada ta-

hun 1951 oleh Maurice Lenormond, orang Prancis yang simpati pada aspirasi Kanak. Ketika lembaga perwakilan wilayah Kaledonia Baru dibuka oleh Prancis pada tahun 1953, masuk beberapa tokoh Kanak, di antaranya adalah Jean-Marie Tjibaou, yang kemudian menjadi pimpinan UC, dan juga pimpinan FLNKS. Pada hakikatnya UC adalah partai multirasial yang berslogan "two colours, one people" menjalankan kebijaksanaan reformis terhadap Prancis tuntutan adalah otonomi internal bagi Kaledonia Baru, yang mendapat dukungan luas dari penduduk Melanesia (Kanak). Dalam tahun 1970-an, sejalan dengan kembalinya pemuda-pemuda Melanesia berpendidikan Prancis, terdapat kekecewaan dari kalangan Melanesia terhadap pelannya laju perubahan, diskriminasi rasial, tetapi berlangsungnya penentangan terhadap aspirasi menuju otonomi lebih luas dari pihak Prancis. Hal ini melahirkan radikalisasi di kalangan pemuda Melanesia terpelajar yang berpedoman pada kebangkitan identitas dan kebudayaan Kanak. Sejumlah tokoh muda Melanesia meninggalkan UC, yang secara spontan mendirikan organisasi-organisasi seperti FULK, PALIKA, UPM.

Untuk mencegah meluasnya perpecahan UC menjalankan kebijaksanaan yang lebih radikal daripada semula. Hal ini sebagian didorong oleh kekecewaan mereka terhadap pembunuhan orang-orang Melanesia oleh penduduk kulit putih. Sebagai akibatnya, UC kehilangan sebagian besar pendukung kulit putihnya, yang kemudian membentuk *Federation pour une Nouvelle Societe Caledonienne* (FNSC), yang kini mendudukkan dirinya sebagai "partai tengah".

Kelompok terbesar kedua dalam FLNKS adalah PALIKA. Partai ini juga bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi Kaledonia Baru, dengan dasar ideologi Marxis, dan melaksanakan gerakan revolusioner dalam mencapai tujuannya. Partai ini dibentuk tahun 1976 oleh beberapa tokoh

<sup>39</sup>John Connell, "New Caldeonia: The Transformation of Kanaky Nationalism", dalam *The Australian Journal of International Affairs*, Vol.41 No. 1, April 1987, hlm. 39-44. Lihat Alan Clark, "Autonomy, Intergration, Development: Elections in New Caledonia, 1979-1982", dalam *Political Science* Vol. 35 No. 1, hlm. 18-23.

muda Kanak terpelajar, seperti Nidoish Nisseline, dan nyonya Dewe Gorodey. Naisseline berpendidikan universitas Prancis, putra kepala suku besar di Mare, yang mempunyai hubungan erat dengan para pemimpin Vanuatu, serta pelarian politik Irian Jaya. Akan tetapi Naisseline keluar dari PALIKA untuk membentuk LKS pada tahun 1981, karena tidak setuju pada aksi revolusioner yang dilaksanakan oleh partai.

FULK merupakan kelompok kecil dalam FLNKS, yang memisahkan diri dari UC pada tahun 1970, dipimpin oleh Yann Celene Uregei. Pada mulanya partai ini, sama seperti UC, menuntut otonomi internal bagi Kaledonia Baru, tetapi tahun 1975 memilih kemerdekaan penuh bagi Kaledonia Baru. Memiliki sayap bersenjata, partai ini melaksanakan pendekatan revolusioner bagi kemerdekaan Kaledonia Baru. Sayap bersenjata partai mendapat dana dan latihan kemiliteran dari Libya, dan paling bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pejuang Kanak.

UPM hanyalah kelompok kecil dalam FLNKS, yang juga menuntut kemerdekaan. Dipimpin oleh Andre Gopea, seorang Melanesia, partai ini mendasarkan diri dari segi agama Kristen.

Partai kecil lain yang ikut bergabung adalah PSK, yang dipimpin oleh aktivis Kanak, dari yang meliputi para buruh serta kaum feminis.

Sementara itu LKS, yang juga menuntut kemerdekaan, merupakan pecahan dari PALIKA, tetapi lebih mementingkan solidaritas kedaerahan dari pendukungnya di wilayah Mare dan Poindinie. Partai yang dibentuk bulan Mei 1981 oleh Nidoish Naisseline, mantan pimpinan PALIKA, dikenal sebagai "Bapak" dari gerakan kemerdekaan Kanak modern, yang menentang aksi revolusioner, dan berusaha menjadi partai moderat dalam FLNKS. Partai ini ikut dalam pemilihan anggota Dewan Teritorial November 1984, dan pemilihan regio-

nal September 1985, meskipun FLNKS memboikotnya.<sup>40</sup>

Partai-partai inilah yang menandatangani piagam FLNKS. Kebijakan Front dibuat melalui konvensi dan kongres. Dipimpin oleh Tjibaou, FLNKS bertugas mengorganisasikan komite-komite perjuangan lokal, yang menyatukan para aktivis di dalam masing-masing kota atau wilayah.

Struktur FLNKS mencerminkan bagaimana rumitnya gerakan pembebasan rakyat Kanak. Masing-masing partai tampaknya memiliki program-program sendiri-sendiri dalam mencapai kemerdekaan. Kadang-kadang partai kecil dalam FLNKS bisa mendapatkan pengaruh yang besar melalui pemimpin karismatisnya atau aktivis-aktivis lokal. Seperti misalnya Uregei, pimpinan FULK, dengan cara-cara radikal, ia dapat memimpin partai-partai kecil lainnya, seperti PALIKA, UPM dan PST, dan sebagainya anggota UC, untuk melakukan gerakan revolusioner. Dengan memanfaatkan kekecewaan rakyat Kanak terhadap Prancis serta sikap pemukim Prancis yang menentang kemerdekaan, Uregei cepat mendapat dukungan dari para aktivis lokal untuk melakukan gerakan bersenjata, blokade jalan, atau pembakaran kotak-kotak suara dalam beberapa pemilihan umum di Kaledonia Baru. Hal ini memang sangat merepotkan Tjibaou dalam memimpin FLNKS.

Tjibaou yang juga menganggap mobilisasi massa sangat penting dalam kemerdekaan, lebih dikenal sebagai "Gandhi dari Pasifik Selatan" sehubungan dengan sikapnya yang antikekerasan. Oleh karenanya, pimpinan FLNKS ini, oleh kaum ekstremis FLNKS, sering dianggap terlalu banyak memberi konsesi terhadap Prancis dan warganegara Prancis di Kaledonia. Barangkali, Tjibaou berpandangan bahwa kemerdekaan di Kaledonia Baru bisa dicapai melalui cara-cara damai,

<sup>40</sup>Connell, *loc. cit.*, hlm. 42.

dengan menarik simpati seluruh masyarakat multirasial Kaledonia Baru. Tjibaou tampaknya menyadari bahwa selain bangsa Kanak masyarakat Kaledonia baru juga meliputi warganegara Prancis baik kulit putih keturunan Kaledonia Baru (Caldoche), Alzajair, Indonesia, Vietnam dan lain-lain. Hal ini tersirap dalam slogan UC "two colours one people". Dalam pemilihan-pemilihan umum yang diikuti oleh partai-partai Kanak jelas, bahwa suara Kanak tidak melebihi dari hanya 40%. Dengan demikian, aksi-aksi revolusioner yang dilakukan oleh FULK, dan UPM hanya akan menjauhkan masyarakat keturunan dari perjuangan kemerdekaan bagi Kaledonia Baru. Untuk sikap damai terhadap orang-orang Caldoche ini, Tjibaou harus menahan luka yang dalam dan juga tidak melakukan pembalasan, ketika kedua saudara kandungnya, Louis dan Karcise termasuk dalam sebelas orang Kanak yang dibunuh yang dilakukan orang-orang Kaldoché di Hienghene pada Bulan Desember 1984.<sup>41</sup>

Sikap antikekerasan juga ditunjukkan dari beberapa peristiwa yang terjadi di dalam FLNKS. Ia menentang terhadap keberangkatan Urugei serta beberapa anggota FULK, dan kepala perwakilan FLNKS di Australia, untuk menghadiri konperensi tentang gerakan-gerakan kemerdekaan di dunia pada Januari 1986, yang berlangsung di Tripoli, Libya.<sup>42</sup> Tjibaou yang mengkhawatirkan menjalarnya "terorisme Libya" dalam perjuangan Kanak, mencopot jabatan Urugei sebagai jurubicara masalah luar negeri FLNKS setelah kepulangannya dari Libya. Tjibaou juga berhasil memenangkan aksi-aksi kekerasan rakyat Kanak, yang terjadi sebagai akibat dari kampanye-kampanye boikot tahun 1984, dan 1987, yang dimotori

oleh kelompok minoritas FLNKS, melalui imbauannya untuk mengangkat blokade jalan yang diletakkan di seluruh pulau serta tidak menghancurkan kotak-kotak suara.<sup>43</sup> Demikian pula, ia tidak menentang kehendak LKS, yang tergabung dalam FLNKS, untuk berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan umum yang dilaksanakannya Kaledonia Baru.

Dengan demikian, memang ada pertentangan antara kubu "Moderat" yang diwakili Tjibaou, dengan kubu ekstremis pimpinan Urugei di dalam FLNKS. Hal ini mencapai puncaknya ketika Tjibaou menandatangani "Matignon Accord" di Paris pada 26 Juni 1988. *Matignon Accord* merupakan kesepakatan damai untuk masa depan Kaledonia Baru yang dibuat oleh Jean-Marie Tjibaou, pemimpin FLNKS, dengan Jacques Lafleur, pemimpin RPCR (*Rassemblement Pour la Caledonia dans la Republique*), partai kulit putih yang loyal terhadap Prancis dengan penengah PM Francis Michaiel Rocard. Inti dari kesepakatan itu adalah menjanjikan satu tahun pemerintahan oleh Prancis, diikuti oleh pemilihan umum bagi tiga propinsi semi otonom. Setelah masa transisi sepuluh tahun, dibuat referendum mengenai kemerdekaan Kaledonia Baru pada tahun 1998.<sup>44</sup>

Matignon Accord yang diratifikasi melalui referendum nasional bulan November 1988 ditentang oleh kubu ekstremis pimpinan Urugei. Sebab, perjanjian itu akan menambah penderitaan rakyat Kanak selama sepuluh tahun lagi. Pertentangan antara Tjibaou dan Urugei tampaknya berakhir dengan pembunuhan terhadap Jean-Marie Tjibaou oleh anggota FULK.

Kematian Tjibaou merupakan tragedi bagi perjuangan Kanak ia telah banyak menyumbang bagi perjuangan melalui cara-

<sup>41</sup>*The Australian*, 9 Mei 1989.

<sup>42</sup>Alan Clark, *The Politics of electoral duality, experience and elections in New Caledonia* (Wellington: New Zealand Institute of International Affairs, 1987), hlm. 38.

<sup>43</sup>*The Age*, 5 Mei 1989.

<sup>44</sup>*The Age*, 4 Juli 1988.

cara damai bagi kemerdekaan Kaledonia Baru, ia juga telah meletakkan dasar bagi masa depan masyarakat multirasial Kaledonia baru. Masalah yang masih harus diperhatikan oleh para pejuang Kanak adalah siapakah yang mampu berbuat seperti Tjibaou. Terlebih lagi adalah "apakah isi *Matignon Accord* dapat dilaksanakan tanpa Tjibaou dan Yeiwene.

## Penutup

Sebagai penutup, dapat penulis katakan bahwa beberapa peristiwa Pasifik Selatan yang terjadi 4 tahun belakangan ini, sekalipun memiliki dasar permasalahan yang berbeda mempunyai tema yang sama, yaitu kekerasan. Ketidakstabilan politik, korban jiwa, serta kerugian material menyertai tindak kekerasan fisik yang terjadi di Fiji, PNG, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Akar persoalan dari masing-masing peristiwa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kudeta Militer di Fiji lebih berakar pada persoalan rasial. Hal ini terutama karena Bumiputra Fiji yang minoritas, mengkhawatirkan dominasi politik dan ekonomi dari kaum pendatang India di kampung halamannya. Persoalan mengenai kepentingan ekonomi tampak dalam Separatisme Bougainville di PNG. Sebagai propinsi yang kaya akan mineral, kaum separatis Bougainville merasakan adanya ketidakadilan, baik di dalam pembagian keuntungan maupun pembangunan wilayah. Sementara, Pemerintah PNG juga enggan melepaskan wilayah yang mampu memberikan pemasukan devisa sekitar 20% bagi negara.

Masalah kepemimpinan politik sangat mewarnai persoalan di Vanuatu. Sekalipun telah melewati masa-masa sulit secara bersama dalam perjuangan kemerdekaan, namun kedudukan puncak dalam pemerintahan dapat memecahkan persatuan antara PM Lini dan Barak Sope. Dalam pada itu, perbedaan strategi perjuangan menentang

penjajahan Prancis dalam FLNKS mengakibatkan tragedi yang suram bagi kemerdekaan Kaledonia Baru.

Kecuali di Kaledonia Baru soal lain yang dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah masalah tanah. Di Fiji, PNG, dan Vanuatu, tanah merupakan salah satu isu yang dimunculkan bagi gerakan penentangan terhadap pemerintah. Soal perpanjangan sewa tanah pribumi dimunculkan oleh gerakan Tuokei di Fiji untuk menentang PM Bavadra. Di PNG, soal eksploitasi tanah rakyat Bougainville oleh pihak perusahaan dan pemerintah nasional juga dilibatkan oleh kaum pemberontak Bougainville. Demikian pula tentang nasionalisasi tanah oleh PM Lini di Vanuatu dikembangkan oleh Sope sebagai "perampasan" hak atas tanah dari para pemilik adat.

Masalah tanah di Pasifik Selatan memang merupakan soal yang mudah membangkitkan emosi rakyat. Selain sedikit, tanah bukan hanya salah satu sumber ekonomis bagi rakyat, tetapi juga memiliki nilai psikologis. Antara lain, misalnya masalah hubungan keputusan antara rakyat dengan kepala suku, dan ikatan darah di antara rakyat di wilayah tertentu. Oleh karena itu, di Fiji, kolonialis Inggris tidak pernah mengambil alih kepemilikan tanah pribumi ke pihaknya. Tanah tetap menjadi milik keluarga luas, yang dalam istilah mereka "mataqali" yang hanya bisa disewakan tetapi tidak bisa dijual. Di Vanuatu dan PNG<sup>45</sup> sebagian besar tanah yang telah dimiliki oleh perusahaan dan orang-orang Eropa dikembalikan kepada pemilik adat setelah kemerdekaan.

Masalah yang cukup penting dalam

<sup>45</sup>Lihat Peter G. Sack (ed.), *Problem of Choice, Land in Papua New Guinea's Future* (Canberra: Australia National University Press, 1974); Peter Larmour (ed.), *Land Tenure in Vanuatu* (Suva/Port Vila: university of South Pacific, 1984).

---

peristiwa-peristiwa di atas adalah bahwa terdapat kekuatan-kekuatan asing yang terlibat di dalamnya. Pasukan Australia selalu diminta kehadirannya untuk mengatasi krisis di PNG, dan Vanuatu. Demikian juga Selandia Baru yang banyak berperan dalam krisis di Vanuatu. Hanya dalam menempatkan pasukannya di daratan, kecuali di wilayah perairan Fiji, di samping sanksi ekonomi. Melihat sikap Australia dan Selandia Baru dalam Kasus Fiji, barangkali, dugaan bahwa AS ikut campur dalam kudeta Rabuka ada benarnya. Dalam hal ini, kita tak dapat menyangkal bahwa Australia dan Selandia Baru merupakan negara-negara besar di Pasifik Selatan yang selalu "menjaga" kepentingan Barat. Selain dari itu, kehadiran tentara Australia dan Selandia Baru di negara-negara yang menghadapi krisis

politik tampaknya berkaitan dengan lemahnya sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara Pasifik Selatan.<sup>46</sup>

Sebaliknya, Libya selalu dilibatkan dalam masalah kekerasan Fisik yang terjadi di PNG, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (FL-NKS). Dalam kasus Separatisme Bougainville di PNG, revolusi bersenjata di Kaledonia Baru, dan percobaan kudeta di Vanuatu terkait di dalamnya soal latihan militer di Libya. Agaknya pembukaan hubungan diplomatik antara Vanuatu dengan Libya memberikan peluang bagi Libya untuk ikut "bermain" dalam percaturan politik Pasifik Selatan. Karena yang tercipta adalah gerakan-gerakan radikal, tak mengherankan bahwa sebagian besar negara-negara Pasifik Selatan mengkhawatirkan meluasnya peranan Libya di wilayah ini.

---

<sup>46</sup>Ron Crocombe, *The South Pacific, an introduction* (New Zealand: Longman Paul, 1983), hlm. 166-167.